

PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN IMPLEMENTASI SISKEUDES DI ERA DIGITAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE

Dewi Satriyanah¹, Basri Basir MR², Nurul Fuada³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹dewisatriyanah03@gmail.com, ²basri.basir@unismuh.ac.id,

³nurulfuada@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of village apparatus competence and the implementation of SISKEUDES (Village Financial Management Information System) in the digital era on the accountability of village fund management in Tellu Limpoe District, Bone Regency. The increasing allocation of village funds, reaching Rp10.22 billion in Tellu Limpoe in 2024, demands strong accountability mechanisms supported by competent human resources and reliable information systems. This study employs a quantitative causal-associative approach with a survey method and explanatory research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 77 village apparatus members and BPD members across 11 villages. The research instrument used a Likert scale and data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 25. The results show that village apparatus competence has a positive and significant effect on the accountability of village fund management ($t = 5.353$; $sig. = 0.000$). The implementation of SISKEUDES has a positive but not significant effect ($t = 1.574$; $sig. = 0.120$). Simultaneously, both variables significantly influence accountability ($F = 27.432$; $sig. = 0.000$), explaining 42.6% of the variance. These findings indicate that improving village apparatus competence is a critical factor in enhancing accountability in the digital era, while SISKEUDES implementation still requires optimization of technological infrastructure to deliver its full potential impact.

Keywords: Village Apparatus Competence, SISKEUDES, Accountability, Village Funds, Digital Era

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparat desa dan implementasi SISKEUDES di era digital terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone. Peningkatan alokasi dana desa yang mencapai Rp10,22 miliar di Kecamatan Tellu Limpoe pada tahun 2024 menuntut mekanisme akuntabilitas yang kuat yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sistem informasi yang andal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan metode survei dan jenis penelitian explanatory research. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 77 aparat desa dan anggota BPD di 11 desa. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ($t = 5,353$; $sig. = 0,000$). Implementasi SISKEUDES

berpengaruh positif namun tidak signifikan ($t = 1,574$; $sig. = 0,120$). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas ($F = 27,432$; $sig. = 0,000$) dengan kontribusi sebesar 42,6%. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi aparat desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas di era digital, sementara implementasi SISKEUDES masih memerlukan optimalisasi infrastruktur teknologi.

Kata Kunci: Kompetensi Aparat Desa, SISKEUDES, Akuntabilitas, Dana Desa, Era Digital

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memperkuat peran strategis desa melalui Program Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi kepada pemerintah desa dalam perencanaan, alokasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Total alokasi Dana Desa pada tahun 2024 mencapai Rp71 triliun dengan rata-rata Rp1 miliar per desa (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Besarnya dana yang dikelola menuntut pengelola untuk memenuhi prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun demikian, laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2024 masih menemukan berbagai kelemahan dalam tata kelola dan pertanggungjawaban dana desa, termasuk rendahnya kepatuhan pelaporan APBDes serta pelaksanaan program yang belum optimal.

Pengelolaan Dana Desa menuntut akuntabilitas tinggi yang menekankan transparansi dan ketepatan waktu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa agar terhindar dari penyimpangan (Bagiada & Hadi, 2023). Efektivitas akuntabilitas dalam suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi (Anas, 2014). Dalam konteks ini, kompetensi aparat desa menjadi fondasi kapabilitas individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif (Sihotang et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi dilakukan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu proses pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dana desa (Nurak et al., 2023).

Permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat ditinjau melalui Teori Keagenan (Agency Theory) yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (masyarakat dan pemerintah) dan agent (aparatus desa). Perbedaan kepentingan dan ketimpangan informasi antara kedua pihak kerap menimbulkan Agency Problem, terutama ketika pengawasan tidak berjalan efektif (Jensen & Meckling, 1976). Dalam kerangka ini, kompetensi aparatus desa mencerminkan kapasitas agen dalam melaksanakan amanah prinsipal secara bertanggung jawab, sementara penerapan SISKEUDES merupakan bentuk investasi pada sistem informasi yang berperan dalam meminimalkan asimetri informasi.

Inkonsistensi temuan empiris pada penelitian terdahulu menjadi salah satu motivasi penelitian ini. Penelitian Saputra et al. (2024) dan Pratiwi & Dewi (2022) mengonfirmasi

bahwa kompetensi aparatus desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, namun temuan Huda et al. (2024) melaporkan pengaruh yang tidak signifikan. Hal serupa terjadi pada pemanfaatan SISKEUDES, di mana Arfiansyah (2020) dan Dewi & Julianto (2020) melaporkan pengaruh positif, sementara Nurak et al. (2023) tidak menemukan pengaruh yang berarti.

Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Tellu Limpoe didasarkan pada transformasi digital yang krusial. Pada tahun 2023, wilayah ini beralih dari SISKEUDES offline menuju sistem berbasis online (Pemerintah Kabupaten Bone, 2023). Meskipun upaya digitalisasi telah dilakukan, persoalan akuntabilitas masih terjadi, dibuktikan dengan temuan inspektorat daerah yang mengungkap adanya keterlambatan dalam penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPJ) di wilayah tersebut (Tribun-Timur, 2025). Pada tahun 2024, kecamatan ini mengelola Dana Desa sebesar Rp10,22 miliar (Kementerian Keuangan RI, 2023) di tengah tantangan keragaman tingkat pendidikan dan infrastruktur digital yang belum merata (BPS Kabupaten Bone, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) pengaruh implementasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan (3) pengaruh simultan kompetensi aparat desa dan implementasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Implementasi SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk menguji hipotesis melalui proses pengumpulan data dengan instrumen penelitian terstandarisasi (Sugiyono, 2023).

Penelitian berlokasi di seluruh desa di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang terdiri atas 11 desa/kelurahan. Objek penelitian adalah aparat desa dan anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini telah menerapkan SISKEUDES online sejak 2023 dan masih menghadapi tantangan akuntabilitas.

Populasi penelitian adalah seluruh aparat desa dan anggota BPD di Kecamatan Tellu Limpoe yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan anggota BPD. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa, mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Setiap desa diwakili oleh delapan responden, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, serta dua anggota BPD. Dari 88 kuesioner yang disebar ke 11 desa, sebanyak 77 kuesioner kembali dan dapat diolah. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin

dari Sangat Tidak Setuju (1) hingga Sangat Setuju (5).

Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan model persamaan $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$, di mana Y adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, X_1 adalah Kompetensi Aparat Desa, X_2 adalah Implementasi SISKEUDES, a adalah konstanta, β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi, dan e adalah error term. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji kualitas data (validitas dan reliabilitas) serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 25.

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) diukur dengan indikator perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan keuangan (Arfiansyah, 2020). Variabel Kompetensi Aparat Desa (X_1) diukur dengan indikator pemahaman, keahlian teknis, inisiatif dalam bekerja, dan kode etik kepegawaian (Sihotang et al., 2024). Variabel Implementasi SISKEUDES (X_2) diukur dengan indikator kemudahan dalam penggunaan,

pengendalian risiko dan keamanan, kesesuaian fitur dengan kebutuhan, dan pemanfaatan perangkat lunak aplikasi (Arfiansyah, 2020).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 77 orang. Berdasarkan usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 25-35 tahun (44,16%), diikuti usia 36-45 tahun (27,27%), usia di atas 45 tahun (23,38%), dan usia di bawah 25 tahun (5,19%). Dari segi jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki (63,64%) dan perempuan (36,36%). Berdasarkan jabatan, distribusi responden terdiri atas Kepala Desa 9 orang, Sekretaris Desa 10 orang, Kaur Keuangan 11 orang, Kaur Perencanaan dan Umum 11 orang, Kasi Pemerintahan 10 orang, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan 11 orang, dan anggota BPD 15 orang.

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA/ sederajat (57,14%), diikuti S1 (35,06%), SMP/ sederajat (5,19%), SD (1,30%), dan Diploma (1,30%). Berdasarkan lama bekerja, sebagian besar responden telah bekerja selama

6-10 tahun (40,26%), diikuti 1-5 tahun (37,66%), lebih dari 10 tahun (15,58%), dan kurang dari 1 tahun (6,49%). Kondisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	%
Usia	< 25 tahun	4	5,19
	25-35 tahun	34	44,16
	36-45 tahun	21	27,27
	> 45 tahun	18	23,38
Pendidikan	SMA/Sederajat	44	57,14
	S1	27	35,06
	Lainnya	6	7,80
Lama Bekerja	6-10 tahun	31	40,26
	1-5 tahun	29	37,66
	> 10 tahun	12	15,58
	< 1 tahun	5	6,49

2. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum karakteristik masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis terhadap 77 sampel, variabel Kompetensi Aparat Desa (X1) memiliki nilai minimum 33, nilai maksimum 50, rata-rata 42,39, dan standar deviasi 4,422. Variabel Implementasi SISKEUDES (X2) memiliki nilai minimum 30, nilai maksimum 50, rata-rata 41,06, dan standar deviasi 4,859. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai minimum 32, nilai

maksimum 50, rata-rata 42,64, dan standar deviasi 4,316. Ketiga variabel menunjukkan kecenderungan nilai yang relatif tinggi dengan tingkat penyebaran data yang tidak terlalu besar, mengindikasikan bahwa secara umum responden memberikan penilaian positif terhadap seluruh variabel yang diteliti.

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Kompetensi Aparat Desa	77	33	50	42,39	4,422
Implementasi SISKEUDES	77	30	50	41,06	4,859
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	77	32	50	42,64	4,316

3. Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel ($df = n-2 = 75$; r tabel = 0,224) pada taraf signifikansi 0,05. Hasil menunjukkan bahwa seluruh 30 item pernyataan untuk ketiga variabel memiliki nilai r hitung yang bernilai positif dan lebih besar dari r tabel dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan nilai 0,871 untuk Kompetensi Aparat Desa, 0,917 untuk Implementasi SISKEUDES, dan 0,904 untuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Seluruh nilai berada di atas 0,70 yang menunjukkan instrumen

memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik (Ghozali, 2018).

4. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,731 dan nilai VIF sebesar 1,369 untuk kedua variabel independen. Karena nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menghasilkan nilai signifikansi 0,301 untuk Kompetensi Aparat Desa dan 0,207 untuk Implementasi SISKEUDES, keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik terpenuhi dan model regresi layak digunakan.

5. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan: $Y = 13,837 + 0,540X_1 + 0,144X_2 + e$. Nilai konstanta sebesar 13,837 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai

nol, tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 13,837 satuan. Koefisien regresi Kompetensi Aparat Desa (X1) sebesar 0,540 berarti setiap peningkatan satu satuan kompetensi aparat desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,540 satuan. Koefisien regresi Implementasi SISKEUDES (X2) sebesar 0,144 berarti setiap peningkatan satu satuan implementasi SISKEUDES akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0,144 satuan.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	13,837	3,482	0,001
Kompetensi Aparat Desa (X1)	0,540	5,353	0,000
Implementasi SISKEUDES (X2)	0,144	1,574	0,120

6. Uji Hipotesis

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Ket.
Kompetensi Aparat Desa (X1)	5,353	1,993	0,000	H1 Diterima
Implementasi SISKEUDES (X2)	1,574	1,993	0,120	H2 Ditolak

Tabel 5 Hasil Uji Simultan (Uji-F) dan Koefisien Determinasi

Uji	Nilai Hitung	Nilai Tabel
Uji F (Simultan)	F = 27,432	F = 3,12
Koef. Determinasi (R ²)	0,426	-

bertindak untuk kepentingan pribadi serta mendorong kepatuhan terhadap kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Deskripsi aktivitas responden mendukung temuan ini. Sebanyak 50,65% responden telah mengikuti pelatihan sebanyak satu hingga dua kali dan 38,96% responden sering mengikuti kegiatan tersebut. Peningkatan kapasitas ini sejalan dengan kemampuan adaptasi teknologi, yang ditunjukkan oleh 83,12% responden yang sering menggunakan sarana komunikasi digital dalam berkoordinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi antara pengetahuan teknis dan pemanfaatan teknologi mampu mempercepat koordinasi, mengurangi hambatan birokrasi, serta mendukung kelancaran pelaporan administrasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pratiwi & Dewi (2022) serta Firmawati et al. (2025) yang menyatakan bahwa desa dengan kompetensi aparat yang tinggi memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang baik. Saputra et al. (2024) juga membuktikan bahwa kompetensi yang baik menjadi kunci terbentuknya pengendalian internal yang kuat, sehingga pengelolaan

7. Pembahasan

a. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji t menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ($t_{hitung} = 5,353 > t_{tabel} = 1,993$; $sig. = 0,000 < 0,05$). Dengan demikian, H1 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparat desa, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Dalam perspektif Teori Keagenan, kompetensi aparat desa berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi antara principal (masyarakat dan pemerintah) dan agent (aparat desa). Aparat yang kompeten lebih mampu memahami regulasi, mengelola keuangan secara tertib, serta menyajikan laporan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kompetensi juga dapat meminimalkan kecenderungan

dana desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat dilakukan secara etis, profesional, dan akuntabel.

b. Pengaruh Implementasi
SISKEUDES terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji t menunjukkan bahwa Implementasi SISKEUDES berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ($t_{hitung} = 1,574 < t_{tabel} = 1,993$; $sig. = 0,120 > 0,05$). Dengan demikian, H₂ ditolak. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun penerapan SISKEUDES cenderung mendukung akuntabilitas, pengaruhnya belum cukup kuat untuk memberikan dampak yang nyata secara statistik.

Dalam perspektif Teori Keagenan, pemanfaatan SISKEUDES sebagai sistem informasi di era digital berperan sebagai alat monitoring untuk mengurangi asimetri informasi serta meminimalkan potensi konflik keagenan. Implementasi sistem ini mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat akurasi pelaporan (Tunya et al., 2023). Namun demikian, efektivitas suatu sistem informasi

tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen terhadap prinsip transparansi (Bawansel et al., 2025).

Ketidaksignifikanan implementasi SISKEUDES dalam penelitian ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya memadai. Sebanyak 63,64% responden menilai ketersediaan fasilitas teknologi berada pada tingkat cukup memadai, sementara 29,87% masih menilai belum memadai. Kondisi infrastruktur digital di Kecamatan Tellu Limpoe yang belum merata, di mana menara BTS hanya tersedia di dua dari 11 desa, menjadi faktor pembatas. Selain itu, penggunaan sistem masih lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan administratif dan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Huda et al. (2024) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Nurak et al. (2023) juga melaporkan temuan serupa di Kecamatan Nita. Hal ini

mempertegas bahwa di era digital, keberadaan sistem informasi keuangan tidak serta-merta menjamin akuntabilitas tanpa disertai kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai di tingkat desa.

c. Pengaruh Simultan Kompetensi Aparat Desa dan Implementasi SISKEUDES terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji F menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa dan Implementasi SISKEUDES secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ($F_{hitung} = 27,432 > F_{tabel} = 3,12$; $sig. = 0,000 < 0,05$). Dengan demikian, H3 diterima. Nilai R Square sebesar 0,426 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 42,6%, sedangkan 57,4% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Temuan ini menunjukkan adanya sinergi antara kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam kerangka Teori Keagenan, kombinasi antara kompetensi aparat desa dan implementasi SISKEUDES

berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent, sehingga mendukung terciptanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih kuat (Jensen & Meckling, 1976).

Peningkatan akuntabilitas tidak semata-mata dapat diwujudkan melalui aspek teknis atau administratif, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, meliputi pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, penerapan etika, serta penguatan tata kelola kelembagaan (Tunya et al., 2023). Meskipun SISKEUDES secara parsial belum memberikan pengaruh yang signifikan akibat keterbatasan infrastruktur, perpaduan antara dukungan teknologi dan kompetensi aparat yang memadai mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih kuat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Firmawati et al. (2025) di Kabupaten Sumbawa Barat yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa dan pemanfaatan SISKEUDES secara bersama-sama terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Silooy et al. (2025)

juga mengonfirmasi bahwa SISKEUDES memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pengujian simultan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Implementasi SISKEUDES di Era Digital terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi dan pemahaman teknis yang dimiliki aparat desa, semakin baik pula kemampuan mereka dalam kebijakan keuangan, penguasaan teknologi, dan kemampuan administratif, yang bermuara pada peningkatan akuntabilitas. Kedua, implementasi SISKEUDES berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keterbatasan infrastruktur teknologi pendukung di lapangan dan pemanfaatan sistem yang masih

berfokus pada pemenuhan administratif semata menjadi faktor pembatas. Ketiga, kompetensi aparat desa dan implementasi SISKEUDES secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan kontribusi sebesar 42,6%. Sinergi antara kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi merupakan faktor kunci dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di era digital.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah kabupaten meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur teknologi di desa dan mendorong pelaksanaan Bimbingan Teknis yang berkelanjutan bagi aparat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan meningkatkan kualitas program pelatihan dengan pendekatan yang lebih aplikatif, khususnya dalam pemanfaatan SISKEUDES. Pemerintahan desa disarankan mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai sarana publikasi informasi keuangan untuk memperluas keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. (2014). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik (1st ed.). Tunggal Mandiri Publishing.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1), 67-82. <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Bagiada, P. P., & Hadi, M. (2023). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(2), 278-289.
- Bawansel, G. I., Walandouw, S. K., & Sardjono, O. Y. M. (2025). Analisis peran sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa: Studi kasus Desa Komus II. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 570-580.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2025). Kecamatan Tellu Limpoe Dalam Angka. BPS Kabupaten Bone.
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281-292.
- Firmawati, S., Putri, Y. E., & Ramlafatma. (2025). Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat. *Ganec Swara*, 19(3), 852-856.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N., Blongkod, H., & Wuryandini, A. R. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 1723-1734.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm*, 283-303.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Lampiran Peraturan Menteri Keuangan: Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- Nurak, Y. V., Mitan, W., & Go'o, E. E. K. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

- di Kecamatan Nita. *Jurnal Rimba*, 1(3), 243-256.
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2023). Implementasi Siskeudes Online.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183-198.
- Saputra, Y., Sari, M. S., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 56-70.
- Sihotang, A. M., Nasrizal, & Hanif, R. A. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 691-703.
- Silooy, R. W., Talla, A., & Simanjuntak, P. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Komitmen Organisasi Dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 8047-8061.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (5th ed.). ALFABETA.
- Tribun-Timur. (2025). Dana Desa Rawan Diselewengkan, Inspektorat Bone Kumpulkan Seluruh Kades. TribunBone.Com.
- Tunya, M. G., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2023). Pengaruh Aplikasi Siskeudes dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa dengan Kompetensi SDM sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 478-488.